

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan*, 2010, Bogor, Ghalia Indonesia
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987
- Kahar S. Cahyo *Pelangi Perjuangan Bergerak Tanpa Batas*; Tonggak Media Yogyakarta, 2020
- Payaman J. Simanjuntak *Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh; Buku Panduan The New Law on Trade unions; A Guide* Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2002
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hanafi Amrani, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Imam supomo 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : djambatan

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Suwarto, *Hubungan Industrial Dalam Praktik*, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat melalui Keputusan Presiden R.I. Nomor 83 tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

C. SUMBER LAINNYA

Kasma, Penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana menghalang - halangi kegiatan serikat pekerja menurut pasal

43 undang undang no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh di hubungkan dengan kepastian hukum, Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, Tahun

Arif Wicaksono, Perlindungan hukum bagi Pekerja yang melaksanakan hak mogok kerja di hubungkan dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* pasal 81 angka 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Skripsi, Universitas Buana Perjuangan, Tahun 2021

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Justisijurnalilmuhukum/article/view/402> di akses pada tanggal 11 April 2022

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kebebasan-berserikat> (di unduh, 23.Mei 2022)

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2000-serikat-pekerja-serikat-buruh> (di unduh, 23.Mei 2022

Berita Acara/risalah Pembentukan Serikat Pekerja dari tanggal 04 agustus 2020 sampai dengan 15 September 2021

Fakta post,Mencermati apa itu union busting, <http://faktapost.com/read-2698-htm>, (di unduh pada tanggal 17 Mei 2022)

Yogo Pamungkas, “*Efektifitas Union Busting Sebagai Tindak Pidana Kejahatan,*” Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Ahmad Juhaeni, KASI syaker Kabupaten Karawang, pada tanggal 12 April 2022

Hasil wawancara dengan Puryanto, KASI pencatatan Serikat Pekerja Kabupaten Karawang, pada tanggal 12 April 2022

Hasil wawancara dengan Judin, Wasnaker Wilayah II Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 April 2022

Hasil wawancara dengan saudara Iskandar, Ketua Serikat Pekerja PT. Indo Spray Perkasa pada tanggal 01 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Andi, Manager HRD PT.Indo Spray Perkasa pada tanggal 22 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Faizal, Fajar, Edwar, Pekerja PT.Indo Spray Perkasa pada tanggal 25 Mei 2022

Hasil wawancara dengan Gilang Romadhon, Sekertaris Serikat Pekerja PT Indo Spray Perkasa, pada tanggal 25 Mei 2022

